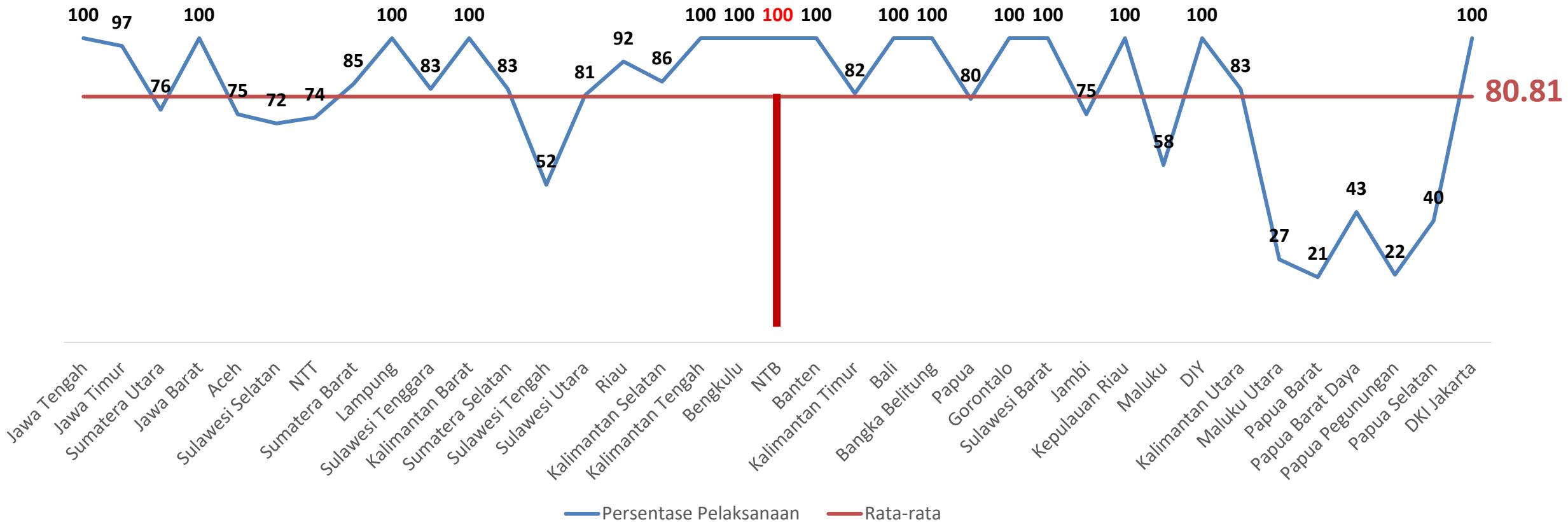


Implementasi Kebijakan SKM dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Data Jumlah Instansi yang Melaksanaan SKM (Nasional)

* Dalam Persen



Data Jumlah Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang Belum Menindaklanjuti SKM



Pendahuluan



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Deputi
YANLIK**

3 Agustus 2023

19 September 2023

13 Oktober 2023

27 Desember 2023

01

**Surat Deputi No.
B/971/PP.99/2023**

Perihal Permohonan Data
SKM dalam Rangka
Pembentukan Indeks
Reformasi Birokrasi.

02

**Surat Deputi No.
B/189/PP.06/2023**

Perpanjangan Periode
Pelaporan Pelaksanaan
Survei Kepuasan
Masyarakat dalam Rangka
Pembentukan Indeks
Reformasi Birokrasi

03

**Surat Deputi No.
B/160/PP.00.01/2023**

Hasil Screening Laporan
Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dan Pemberitahuan
Perpanjangan Periode
Pelaporan SKM Untuk
Pembentukan Indeks
Reformasi Birokrasi

04

**Surat Deputi No.
B/226/PP.00.01/2023**

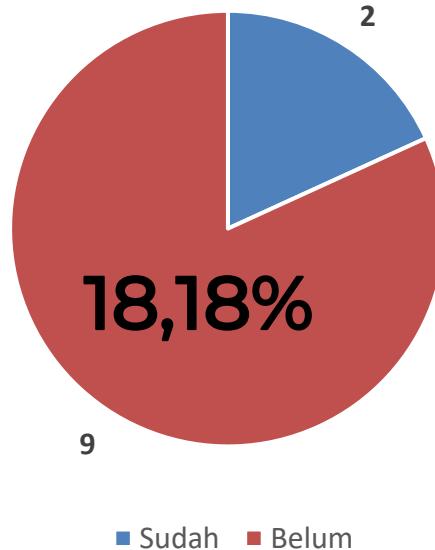
Kewajiban Penyampaian
Laporan SKM Tahun 2023

Indikator Reviu Laporan Pelaksanaan SKM

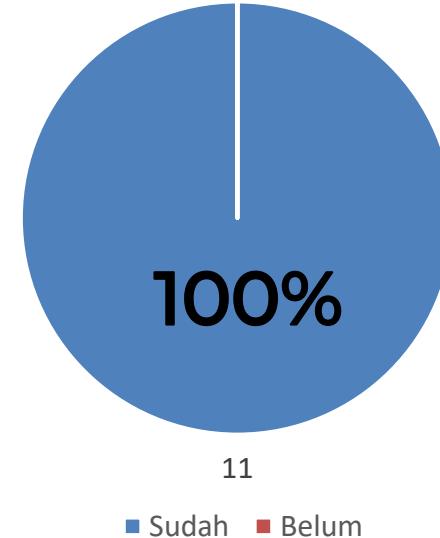
- 1 Keterlaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat → Keterlaksanaan dilihat dari apakah instansi pemerintah telah menyampaikan laporan atau belum
- 2 Jumlah UPP yang Melaksanakan → Jumlah UPP dilihat dari bukti laporan organisasi serta laporan UPP yang tertera pada lampiran laporan organisasi
- 3 Kesesuaian Kuesioner → Kuesioner yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017.
- 4 Laporan pelaksanaan SKM Telah Dikompilasi → Laporan pelaksanaan SKM dikompilasi oleh Biro/Bagian Organisasi untuk dibentuk IKM Instansi dan disusun rencana aksi.
- 5 Tindaklanjut hasil SKM periode sebelumnya → UPP telah melampirkan bukti dukung tindaklanjut hasil survei pada periode sebelumnya.
- 6 Bukti pelaksanaan SKM UPP → Laporan yang disusun oleh Biro/Bagian Organisasi melampirkan bukti/laporan pelaksanaan SKM di UPP.
- 7 Ketepatan penyampaian laporan SKM → Laporan yang disampaikan oleh Biro/Bagian Organisasi tidak melebihi tanggal 31 Desember 2023.

Hasil Reviu Laporan Pelaksanaan SKM Lingkup NTB

Tindak Lanjut SKM



Jumlah Instansi yang Telah Melaksanakan SKM



Instansi yang Sudah Menindaklanjuti SKM:

1. Provinsi NTB
2. Kabupaten Dompu



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Deputi
YANLIK**

Ketentuan Penyampaian Laporan SKM Tahun 2024

Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 12 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan SKM di Lingkup Instansi Pemerintah

Waktu

15 Desember 2024

Format Laporan

bit.ly/templatelaporanskm

Link

bit.ly/pelaporanskmfkp



Pada Tahun 2024 setiap Instansi **WAJIB menyampaikan laporan tindak lanjut hasil SKM periode sebelumnya yang dilakukan oleh UPP**

Hasil SKM yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan akan digunakan untuk proses PEKPPP dan Pembentukan Indeks Reformasi Birokrasi

**Rencana Tahun 2025:
SKM dijadikan F03 PEKPPP**

Pembentukan Indeks RB sejak tahun 2022 SKM mendapatkan bobot 8%

Terima Kasih

Berikut adalah nomor Help Desk Asdep PPM serta tautan materi SKM dan FKP:



bit.ly/partisipasiyanlik



0811-1928-2666



asdep.ppm@menpan.go.id

